

JK: Tunda Pemilu 2024 Melanggar Konstitusi

MAKASSAR (IM) - Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilihan Umum 2024. JK menegaskan, jika memperpanjang Pemilu dari jadwal yang telah ditetapkan adalah melanggar konstitusi. "Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi," tegas JK usai menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin (Unhas) di Hotel Four Point Makassar, Jumat (4/3).

"Kecuali kalau konstitusinya diubah," kata JK. JK berpendapat, jika bangsa Indonesia memiliki sejarah Panjang tentang konflik. Sehingga JK berpendapat untuk memilih taat pada konstitusi saja. "Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja," tegas politisi senior berlabang pohon beringin itu lagi.

Sebelumnya, JK juga mengemukakan, jika konstitusi sudah mengamankan pemilihan umum digelar lima tahun sekali. JK khawatir, jangan sampai wacana penundaan Pemilu berujung masalah sebab adanya pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri.

"Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut," ungkapnya lagi.

Untuk diketahui, ide penundaan Pemilu 2024 muncul belakangan, tidak lama setelah pengumuman jadwal Pemilu 2024 oleh KPU RI. Usulan menunda pemilu muncul dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Usulan itu kemudian diusulkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. ■ han

Pratu Heriyanto Korban Penembakan KKB di Beoga Dievakuasi ke Timika

JAKARTA (IM) - Prajurit Satu (Pratu) Heriyanto mengalami luka saat baku tembak dengan kelompok KKB teroris di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Saat ini, korban telah dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika.

Korban sudah dievakuasi menggunakan pesawat terbang nomor registrasi PK-LTF milik Asian-One.

"Saat ini korban sudah berada di RSUD Timika," kata Kepala Penerangan Kodam XVII /Cenderawasih, Kolonel Infantri Aqsha Erlangga, di Jayapura, Jumat (4/3).

Korban diserang sekitar pukul 12.45 WIT, saat itu 12 personel Pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif R 408/SBH berpatroli sekaligus memperbaiki saluran air yang berjarak sekitar 50 meter dari pos.

Ketika memperbaiki saluran air itulah kelompok bersenjata tiba-tiba menyerang dan menembaki para prajurit hingga terjadi baku-tembak.

Korban merupakan pasukan elite berkualifikasi raidier dari Batalyon Infanteri Raider 408/Suhbrastha (Yonif

Raider 408/Suhbrastha) yang merupakan batalyon infanteri elite organik di bawah Kodam IV/Diponegoro.

Yonif Raider Mekanis 408/SBH saat ini berada dibawah komando langsung Korem 074/Warastratama yang berkedudukan di Jl. Sukowati, Kabupaten Sragen. Sedangkan Markas Komando Yonif RM 408/SBH terletak di Kabupaten Sragen, Markas Kompi Senapan A berada di Kabupaten Sragen, Kompi Senapan B berada di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Boyolali, Kompi Senapan C, Kompi Bantuan dan Kompi Markas berada di Kabupaten Sragen.

Kapdem melanjutkan, kelompok bersenjata menyerang mereka, pada Kamis 3 Maret 2022, saat prajurit yang bertugas di Pos Koramil Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, sedang berpatroli hingga Heriyanto tertembak.

"KSB berjumlah 15 orang dan tiga orang di antaranya membawa senjata api laras panjang. Setelah terjadi baku-tembak, mereka dilaporkan menuju ke arah Kampung Ogamki, Distrik Beoga," tandasnya. ■ mei



FOTO: ANI

KAMPANYE KREATIF PENYELAMATAN SATWA DILINDUNGI

Aktivis lingkungan dari yayasan HAKA berkolaborasi dengan seniman dan mahasiswa mengenakan badut badak saat aksi penyelamatan satwa dan lingkungan di Banda Aceh, Aceh, Jumat (4/3). Aksi kreatif tersebut merupakan kampanye menyuarakan pelestarian satwa dan mendesak pemerintah serius memberantas pelaku kejahatan perdagangan satwa dilindungi yang kasusnya meningkat setiap tahun di Aceh.

Berkas P21, Bupati Muba Nonaktif Dodi Alex Noerdin Segera Diadili

PALEMBANG (IM) - Berkas perkara tiga tersangka Bupati Muba nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin, Kadis PUPR Herman Mayori dan Kabis SDA/PPK Eddi Umar, telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tipikor Palembang.

Ketiganya merupakan tersangka korupsi terkait penerimaan fee hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa infrastruktur empat paket proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021.

Saat mendampingi Pengadilan Tipikor Palembang, tim JPU KPK membawa sejumlah koper yang berisi berkas dakwaan. Koper-koper tersebut diserahkan ke bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang.

"Hari ini kami tim Jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara sekaligus surat dakwaan atas nama tersangka DRA, HM dan EU dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin kepada Pen-

gadilan Tipikor Palembang," ujar Jaksa KPK, Ihsan, saat ditemui di Pengadilan Tipikor Palembang, Jumat, (4/3).

Selanjutnya berkas perkara ketiga tersangka diserahkan, kini Jaksa tinggal menunggu penetapan jadwal persidangan lantaran berkas sudah lengkap atau P21. Dalam perkara ini, Dirut PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy, selaku kontraktor pemenang empat proyek pada Dinas PUPR Muba, sudah disidangkan lebih dulu. Pada Kamis (10/3) mendatang kasusnya sudah diputus Majelis hakim.

Dalam persidangan, Suhandy dituntut Jaksa KPK dengan hukuman pidana selama tiga tahun penjara. Terungkap dari fakta persidangan dari empat proyek dengan nilai pagu anggaran Rp20 miliar lebih, terdakwa Suhandy mengaku memberikan fee total Rp4 miliar lebih.

Selain kepada Dodi Reza Alex, Suhandy juga turut memberikan kepada Bupati Dodi Reza Alex Noerdin senilai Rp2 miliar pada tahun 2020, kemudian kepada Kadis PUPR Herman Mayori senilai Rp1 miliar lebih, lalu selebihnya diberikan kepada Eddy Umari. ■ mei

2 Polhukam

FOTO/SETKAB.GO.ID



MENKO PMK TINJAU LOKASI GEMPA DI SUMBAR

Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Muhadjir Effendy saat meninjau lokasi terdampak gempa bumi di Sumbar (Sumatera Barat), Kamis (3/3). Menko PMK Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah segera mempercepat proses validasi data pengungsi terdampak bencana gempa bumi di Sumbar.

Soal Pemindahan IKN Nusantara, KSAD: Tak Ada Tawar Menawar Lagi

Jenderal Dudung tegaskan, soal IKN Nusantara tak ada tawar-menawar lagi di tubuh matra darat. TNI AD siap mengawal dan mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan.

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman memastikan akan merespons cepat seluruh instruksi yang ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu. Dimana, saat itu Jokowi

meminta dukungan TNI-Polri terkait pemindahan IKN Nusantara.

Dudung memastikan, hal itu sudah merupakan kepastian, tak ada tawar-menawar lagi di tubuh matra darat.

"TNI AD siap mengawal dan mendukung penuh

kebijakan pemerintah terkait pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan, tidak ada tawar-menawar lagi," ujar KSAD Dudung dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat (4/3).

Dia mengatakan, dalam Rapim TNI AD yang digelar pada Rabu (2/3) beberapa isu dan langkah strategis turut menjadi bahasan.

Adapun isu yang dibahas diantaranya mengantisipasi perkembangan situasi global akibat dampak pandemi Covid-19 dan dampak dari konflik internasional Ukraina dan Rusia.

Menurut Dudung, dua hal

di atas berpengaruh dan berdampak pada kehidupan dan perekonomian nasional secara menyeluruh.

"Termasuk juga dibahas langkah-langkah strategis dalam penanganan radikalisme, penanganan Papua hingga percepatan vaksinasi dan membantu pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan dalam rangka pemulihan perekonomian nasional," katanya.

Perubahan Lantaman

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebelumnya menyebut telah mengusulkan perubahan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Adapun perubahannya menjadi Komando Daerah Maritim atau Kodamar.

Dia menuturkan, perubahan itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi TNI. Menurutnya, Kodamar bertugas sebagai komando garis pertahanan pantai.

"Untuk IKN ini posisinya di tengah tidak di pinggir laut seperti di Tanjung Pinang, Surabaya, dan Jakarta. Sehingga satuan operasional, nantinya Lantamal ini kita usulkan jadi Komando Daerah Maritim atau Kodamar yang memiliki tugas sebagai komando gabungan pertahanan pantai," ujar Yudo di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (2/3) lalu.

Perubahan Lantamal menjadi Kodamar akan ini tentunya akan berlaku di seluruh Lantamal. Menurut dia, perubahan ini hanya berlaku untuk nama

saja, namun tugas dan fungsi masih sama.

Dia menuturkan nantinya Kodamar akan dipimpin oleh Panglima Komando Daerah Maritim (Pangkodamar). Pangkodamar sendiri akan dijabat oleh Perwira Tinggi (Pat) TNI AL bintang dua dengan pangkat Laksamana Muda (Laksda). "Seluruh Lantamal diubah menjadi Kodamar. Jadi Kodamar ini nantinya membawahi pangkalan-pangkalan tipe A, B, C dan ini hanya nama saja Lantamal menjadi Kodamar. Nanti dipimpin bintang dua," katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menuturkan pihaknya akan membangun markas baru di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Adapun perubahannya menjadi Komando Daerah Maritim atau Kodamar. Dia memiliki kebutuhan tanah 800 hektare, TNI AU 2.700 hektare, dan TNI AL 1.300 hektare. Sehingga jika diakumulasikan, luas total tanah yang dibutuhkan TNI untuk pembangunan markas mencapai 4.500 hektare. Luas tanah sebesar itu dibutuhkan Jenderal Andika untuk membangun Komando Daerah Militer (Kodam) baru, Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud), Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal), serta tiap-tiap perangkatnya.

"Untuk menghidirkan Kodam baru dan seperangkatnya. Untuk Angkatan Udara tadi seperangkatnya termasuk Lanud. Kemudian Angkatan Laut di situ ada Armada, Pangkalan Angkatan Laut, itu kira-kira total semuanya darat, laut udara itu 4.500an hektare," ujar Andika kepada wartawan, Kamis (17/2) lalu. ■ han

Istana: Pembayaran Ganti Rugi Desa Wadas Harus Sudah Rampung Sebelum Lebaran

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan percepatan pembayaran ganti rugi tanah masyarakat terkait pembangunan proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, agar bisa rampung sebelum perayaan lebaran Idul Fitri tahun ini yang jatuh pada awal bulan Mei.

Hal ini ditegaskan Dr. Moeldoko dalam rapat koordinasi terkait dinamika sosial penambangan mineral Bendungan Bener, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (4/3).

"Proses pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat Wadas ini harus rampung sebelum lebaran. Deputi I Kantor Staf Kepresidenan akan saya tugaskan untuk turut mengawal dan memonitor proses ini," kata Moeldoko dalam keterngannya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Purworejo, serta elemen-elemen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Ke-

menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Polri dan TNI.

Data dari Kementerian ATR/BPN, sebanyak 163 bidang tanah masyarakat sudah selesai diukur dan saat ini sedang dalam masa waktu tunggu 14 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan. Warga pemilik 163 bidang tanah ini dipastikan akan segera menerima pembayaran ganti rugi sebelum lebaran. Sementara itu, 136 bidang tanah lainnya juga dalam proses pemenuhan persyaratan.

Data kementerian juga menunjukkan terdapat setidaknya 176 bidang tanah di Desa Wadas yang proses pembebasannya masih terhambat masalah hukum. Terkait hal ini, Moeldoko akan mengugaskan tim hukum KSP untuk turut memonitor proses percepatannya di Mahkamah Agung.

"Upaya debottlenecking konflik di Wadas ini tidak boleh berlarut-larut. Kita bersama mencari solusi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional. Kita tidak

boleh mengatakan 'mudah-mudahan', karena ini 'harus' tertangani," tegas Moeldoko.

Moeldoko juga menekankan pemerintah sedang berupaya untuk menghilangkan polarisasi yang muncul di masyarakat melalui kegiatan sosial seperti olah raga bersama, sholat berjamaah, dan pengadaaan kegiatan bakti sosial.

"Saat ini TNI-Polri sedang melaksanakan berbagai kegiatan sosial di wilayah tersebut untuk menghilangkan sekat-sekat yg ada di masyarakat. Kami ingin masyarakat kembali rukun sehingga tak ada bibit polarisasi yang menyebabkan disintegrasi dan mengganggu ketahanan negara," kata Moeldoko.

Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi publik dari pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk mitigasi sosial dan mitigasi konflik ke depan. "Sampaikan saja soal harga ganti rugi ini ke masyarakat secara terbuka. Lalu segera bayarkan. Karena kalau sudah terbayar, ini akan mempengaruhi psikologis dan kondisi di lapangan. Stigmatisasi proyek ini akan terus ada disana kalau tidak cepat dibayarkan," kata Ganjar. ■ han



FOTO: ANI

PEMERIKSAAN KASUS DUGAAN SUAP DI PEMKOT BEKASI

Tersangka Camat Jatisampurna nonaktif Wahyudin berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/3). Penyidik KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Wahyudin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.

Waspada Kopi Saset Mengandung Paracetamol dan Sildenafil

JAKARTA (IM) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan kopi saset yang mengandung bahan kimia obat, paracetamol dan sildenafil.

Ketua BPOM Penny K Lukito menjelaskan, dalam kemasan kopi tersebut tertera izin BPOM yang dipastikan palsu. Kopi kemasan itu beredar di Bandung dan Bogor. Kopi instan saset itu bermerek Kopi Cleng, Kopi Bapak, dan Kopi Jantan.

"Masyarakat harus berhati-hati. Walaupun ada tertera izin edar Badan POM, bisa dimungkinkan pemalsuan. Itulah kenapa kita perlu mengecek BPOM mobile, kalau kita sudah melakukan check kemasan, label, kedaluwarsa, tapi tetap harus cek kembali apa betul izin edarnya itu adalah betul-betul tidak palsu," kata Penny dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (4/3).

Penny mengatakan, penggunaan bahan pangan yang mengandung bahan kimia obat ini berisiko pada kesehatan, seperti gangguan jantung dan gangguan hati.

"Siapa pun yang mengonsumsi ini ya kemudian gangguan-gangguan lainnya bahkan bisa menyebabkan kematian, penyakit kanker juga memungkinkan tentunya," ujarnya.

Penny mengatakan, sat mengemul operasi, BPOM menemukan barang bukti berupa bahan baku produksi

kopi tersebut. Di antaranya paracetamol dan sinedafil lebih dari 30 kilogram dan bahan baku setengah jadi lebih dari 50 kilogram serta kapsul dan bahan kemasan lainnya.

"Ada alat produksi sederhana dan tidak memenuhi cara produksi obat yang baik, kemudian ada produk jadinya sendiri," ucapnya.

Lebih lanjut, Penny mengatakan, dalam operasi tersebut, ada dua tersangka terkait pemalsuan izin edar BPOM dan fasilitas produksi ilegal.

"Pasal yang di berlakukannya adalah pasal 196, 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pidana penjara 15 tahun paling banyak dan denda paling banyak satu setengah miliar serta Undang-Undang tentang Pangan," katanya. ■ mei

PENGUMUMAN

Berdasarkan keputusan pemegang saham PT. Milan Sumber Rejeki, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") tanggal 7 Februari 2022 sebagaimana tertera di atas, tanggal 2 Maret 2022 No.02, dibuat dihadapan L. Enywati Tjendra, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan bahwa terhitung sejak tanggal 7 Februari 2022 Perseroan dibubarkan, & menunjuk SHELVA selaku Likuidator untuk menyelesaikan segala sesuatu sehubungan dengan pembubaran tersebut. Kepada pihak-pihak yang keberatan, dapat mengirimkan surat keberatan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator dengan alamat Metro Permata I B.2/26, RT.001, RW.011, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, & kepada Kementerian Hukum & HAM RI, Ditjen AHU, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan. Jakarta, 5 Maret 2022 Likuidator PT. Milan Sumber Rejeki